

PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIDESA WINEBETAN KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA

*Jenifer Cindy Rolos¹
Sarah Sambiran²
Frans Singkoh³*

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan infrastruktur desa. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang ada dilapangan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam terhadap para indorman. Dari hasil penelitan didapati Dalam dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Dewasa ini masyarakat menuntut peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Untuk menunjang pembangunan di desa peran serta Kepala Desa serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah, memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi serta kebebasan bagi manusia. pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program

pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Dalam pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa.

Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa

menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

Pemerintah desa Sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu merubah taraf hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera, adil, tentram aman dan damai.

Menurut pengamatan peneliti di Winebetan Kecamatan Langowan Selatan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan balai desa, jalan ke kebun, jalan dibeberapa jaga, namun pelaksanaannya belum maksimal dan terkesan lambat. Peran pemerintah desa sampai saat ini dirasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap masih kurang adanya kerjasama antara aparat pemerintah terlebih antara aparat dengan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Taka da peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Berdasarkan uraian tersebut dapat

diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai sebab dan akibat.

Pemerintahan artinya penyelenggaraan urusan Negara. Adapun desa adalah kesatuan masyarakat dengan batasan wilayah tertentu. Masyarakat tersebut memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Jadi, Pemerintahan desa dapat diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah di desa.

Pemerintahan desa termasuk salah satu perangkat pemerintahan daerah. Pemerintah desa mendapat limpahan tugas dari pemerintah daerah. Meski demikian, tidak semua tugas pemerintah daerah dilimpahkan kepada pemerintah desa. sebagian tugas pemerintah daerah dilimpahkan di kecamatan. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih oleh rakyat desa setempat. Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara untuk kesejahteraan masyarakat. Secara etimologi pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

- 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- 2) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah).
- 3) Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai

tujuan Negara itu sendiri. (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah.

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala dan perangkat desa. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat (Haw. Widja, (2005:148). Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.

Pengertian Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonoomi daerah.

Menurut Samual (2006:98) mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu :

- 1) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
- 2) Pemerintah dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Pemerintah desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Konsep pembangunan adalah konsep mengenai kemajuan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan suatu negara. Konsep pembangunan tersebut selalu dikembangkan dari masa ke masa agar negara atau pemerintah dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Pembangunan adalah proses yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Administrasi adalah keseluruhan proses

pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, Pembangunan memiliki pengertian sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan juga bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kansil (Patton 2005:60) mengatakan pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahannya, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur berarti prasarana

atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan dan lain-lain. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industry dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling berintegrasi satu sama lainnya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Menurut Bogdan dan Tylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Fokus penelitian ini adalah peranan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mensyaratkan masyarakat di Desa Winebetan Kecamatan Langowan Selatan. Menurut Soekanto peranan

mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengenai kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan maupun kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, maka dapatlah dipahami bagaimana luas dan kompleksnya permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam menunjang keberhasilan dari seorang pemimpin seperti pemerintah, maka bukan saja diukur dari segi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ataupun penyelenggaraan program pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga bagaimana seorang pemerintah mampu menumbuhkan kembangkan partisipasi baik berupa dukungan penuh dari masyarakat maupun sumbangansumbangan lainnya yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk menyukseskan pembangunan yang akan diselenggarakan ataupun kebiasaan yang dihadapi oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif pada setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Kendala-kendala maupun kebiasaan-kebiasaan yang dihadapi oleh pemerintah antara lain :

- a. Kesadaran Masyarakat
- b. Kurang aktifnya aparat pemerintah
- c. Sikap Mental Masyarakat

Dari keseluruhan kendala ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya memiliki keseriusan maupun perhatian utama dari pemerintah yang ada di desa Winebetan, lewat kemampuan maupun kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi maupun memecahkan kendala-kendala maupun kebiasaan - kebiasaan tersebut dengan sebaik mungkin.

Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijelaskan diatas dalam proses penggunaannya, entah apakah akan dihilangkan secara keseluruhan ataupun hanya sekedar mengurangi kebiasaan-kebiasaan tersebut pasti akan memakan waktu yang cukup panjang, karena kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah tertanam cukup lama dalam diri setiap masyarakat.

Jadi pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya agar dapat memperhatikan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat mengingat masyarakat yang begitu majemuk dan sehubungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Jadi pemerintah dalam hal ini agar selalu arif dan bijaksana dalam mengambil maupun menjalankan kebijakannya, agar tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam penelitian ini keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan di desa didefinisikan sebagai tingkat realisasi dari pelaksanaan program-program pembangunan di desa yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat sebelumnya perencanaannya. Indikator pengukurannya dilihat dari partisipasi dan dukungan masyarakat dan tingkat pencapaian sasaran atau target dari pada program yang ditetapkan baik dilihat dari segi keberhasilan fisik maupun dari segi manfaatnya bagi masyarakat desa setempat.

Dari hasil wawancara dengan para informan mengenai pelaksanaan pembangunan di Desa Winebetan didapati sebagian besar informan menilai pelaksanaan pembangunan di Desa Winebetan sudah berhasil, hanya sebagian yang menjawab pelaksanaan pembangunan kurang berhasil mereka beralasan masih adanya pembangunan seperti penyelesaian jalan kebun yang belum rampung dan beberapa kegiatan pembangunan balai desa yang masih harus ditambah.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Winebetan sebagian besar berhasil dan masih ada yang harus dibenahi yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan kurang berhasil. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Winebetan oleh pemerintah Desa Winebetan berhasil.

Kesimpulan

- a. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah bisa dianggap mampu, karena sesuai dengan hasil jawaban dari informan.
- b. Dalam setiap program pembangunan yang dijalankan di desa Winebetan, pembangunan infrastruktur, maka pemerintah selaku aparat pemerintah daerah di desa Winebetan memiliki kemampuan yang cukup dalam menyelenggarakan program pembangunan tersebut, karena pemerintah dalam hal ini sebagai

- administrator di bidang pembangunan dan pemerintahan sekaligus sebagai administrator dibidang kemasyarakatan sudah menjalankan perannya dengan baik.
- c. Dari hasil penelitian, baik dilihat dari segi peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa faktor penghambat seperti yang sudah disebutkan diatas sebelumnya, namun hal demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah lewat motivasi-motivasi yang disampaikan secara langsung serta melalui meningkatkan efektivitas kerja setiap aparatur yang ada di desa Winebetan.
- d. Dalam melaksanakan tugas pemerintah sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena pemerintah sering terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi langsung setiap kegiatan pembangunan yang sementara dikerjakan atau dilaksanakan.

Saran

- a. Segala bentuk kegiatan, baik dalam bentuk dalam pelaksanaan pembangunan, sudah boleh dikatakan berperan dan mampu, akan tetapi pemerintah harus terus melakukan hal-hal yang menurut masyarakat itu baik dan dapat menyerap setiap aspirasi yang mereka sampaikan.
- b. Dalam menjalankan program pembangunan, sangat perlu untuk dapat melibatkan masyarakat, maka dengan demikian akan tercipta suatu hubungan dan kinerja yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. disamping itu juga akan membuat masyarakat merasa bertanggungjawab atas pembangunan tersebut serta akan

memelihara akan hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya.

- c. Dan hal yang terpenting untuk perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dalam melakukan hal-hal pembinaan secara signifikan kepada masyarakat dengan jalan menanamkan kesadaran penuh kepada mereka akan pentingnya pembangunan itu. Karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pikiran setiap anggota masyarakat bahwa pembangunan adalah juga milik dari seluruh masyarakat yang ada di dunia khususnya bagi mereka yang tinggal dan menetap di desa Winebetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiman, 2006. Pembangunan Di Laksanakan Dalam Rangka Mencapai Tujuan. Jakarta: PT. Pustaka Pelajar
- Finer, Samuel Edward. 2006. Pemerintahan Komparatif. Bandung: PT. Ghalia Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kodoatie, Robert J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar
- Nurcholis Hanif, 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: PT. Erlangga.
- Patton, Adri. 2005. Pemimpin Informasi, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah. Malang: PT. Agritek Yayasan Pembangunan Malang.
- Prof. Drs, H.A.W. Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 72 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasda.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka

Raho Bernard, 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka

Riyadi dan Bratakusuma, Deddy Supriyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Soekanto Soerjono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Rajawali pers.

Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri. 2006. Keuangan Negara Dam Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. Fokus Media